

PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (TEORI DAN PRAKTEK)



Tino Kemal Fattah, SE., M.Ak.; Analisa, S.E., M.Ak.; Nadia Puteri Utami, S.E., M.M.; Reistiawati Utami, S.E., M.M., Ak., CA.; Dr. Maya Rezeki Angriani, S.I.Kom., M.M.

Pengantar Akuntansi Sektor Publik : Teori Dan Praktek

Tino Kemal Fattah, S.E., M.Ak.

Analisa, S.E., M.Ak.

Nadia Puteri Utami, S.E., M.M.

Reistiawati Utami, S.E., M.M., Ak., CA.

Dr. Maya Rezeki Angriani, S.I.Kom., M.M.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengantar Akuntansi Sektor Publik : Teori Dan Praktek

Penulis :

Tino Kemal Fattah, S.E., M.Ak.

Analisa, S.E., M.Ak.

Nadia Puteri Utami, S.E., M.M.

Reistiawati Utami, S.E., M.M., Ak., CA.

Dr. Maya Rezeki Angriani, S.I.Kom., M.M.

ISBN : 978-634-7428-22-6

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :

Annida Muthi'ah

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Oktober 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku "*Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik*" ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, konsep, praktik, serta tantangan dalam akuntansi sektor publik, yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Akuntansi sektor publik bukan hanya sekadar pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Dalam era modernisasi tata kelola pemerintahan, akuntansi publik memainkan peranan vital dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat, menjaga integritas keuangan negara, serta membangun kepercayaan publik.

Buku ini disusun dengan pendekatan sistematis dan akademis, mencakup pembahasan mulai dari konsep dasar akuntansi sektor publik, lingkup dan kerangka regulasi, sistem akuntansi pemerintahan, konsep anggaran, pencatatan dan laporan keuangan publik, akuntansi aset, pendapatan dan belanja, hingga audit, transparansi, dan reformasi akuntansi publik. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan studi kasus dan praktik terbaik dari berbagai negara, yang diharapkan dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pengelola keuangan publik di Indonesia.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, aparat pemerintah, serta pihak-pihak yang tertarik dalam bidang akuntansi sektor publik. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini ke depannya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman, praktik, dan kualitas akuntansi sektor publik demi terciptanya tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	7
A. Definisi Akuntansi Sektor Publik.....	7
B. Perbedaan Akuntansi Publik dan Akuntansi Privat.....	8
C. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	10
D. Karakteristik Organisasi Publik	11
E. Peran Akuntansi dalam Tata Kelola Publik.....	12

BAB 1

KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh organisasi publik, baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga publik lainnya. Berbeda dengan akuntansi sektor privat yang bertujuan utama menghasilkan laba, akuntansi sektor publik lebih menekankan pada akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar akuntansi sektor publik menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi, standar akuntansi pemerintahan, serta mekanisme penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan memahami dasar-dasar akuntansi sektor publik, para mahasiswa, praktisi, maupun pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara akan memiliki bekal pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kredibilitas pengelolaan keuangan publik di era modern yang semakin menuntut keterbukaan dan profesionalisme.

A. Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penyajian, serta pengungkapan transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dengan tujuan utama untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Organisasi sektor publik di sini mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, yudikatif, lembaga pendidikan negeri, rumah sakit umum daerah, BUMN/BUMD, serta organisasi non-profit yang menggunakan dana masyarakat. Menurut Governmental Accounting Standards Board (GASB), akuntansi sektor publik merupakan

suatu sistem yang dirancang untuk membantu entitas pemerintahan dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berbeda dengan akuntansi sektor privat yang lebih menekankan pada laba (profit oriented), akuntansi sektor publik menekankan pada aspek akuntabilitas publik dan pengendalian anggaran. Artinya, laporan keuangan yang disusun bukan hanya untuk kepentingan internal manajemen, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan negara. Akuntansi sektor publik juga memiliki karakteristik khusus, misalnya penggunaan basis kas menuju akrual dalam pencatatan, adanya standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebagai pedoman resmi di Indonesia, serta orientasi pada pengelolaan anggaran negara/daerah yang dituangkan dalam APBN atau APBD.

Dengan demikian, akuntansi sektor publik dapat dipahami sebagai instrumen penting dalam mendukung praktik good governance melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas keuangan negara. Pemahaman definisi ini menjadi landasan awal bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi untuk mendalami lebih lanjut prinsip, standar, serta praktik akuntansi sektor publik dalam berbagai konteks kelembagaan.

B. Perbedaan Akuntansi Publik dan Akuntansi Privat

Akuntansi publik atau akuntansi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi privat atau akuntansi sektor swasta, baik dari segi tujuan, pengguna laporan, maupun dasar hukum yang digunakan. Perbedaan mendasar terletak pada tujuan utama pencatatan dan pelaporan keuangan. Akuntansi publik lebih menekankan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat atau dana negara, sehingga laporan keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Sebaliknya, akuntansi privat lebih berorientasi pada pencapaian laba (profit oriented) serta memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemilik, investor, kreditor, maupun pihak manajemen dalam mengambil keputusan bisnis.

Dari segi sumber dana, sektor publik memperoleh anggaran terutama dari pajak, retribusi, hibah, maupun sumber daya negara yang dikelola untuk kepentingan umum. Sedangkan sektor privat memperoleh dana dari penjualan produk atau jasa, investasi pemilik, maupun modal pinjaman. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada pengguna laporan keuangan. Dalam akuntansi publik, laporan keuangan ditujukan kepada masyarakat, lembaga legislatif, lembaga pengawas, serta pemangku kepentingan publik lainnya. Sementara pada akuntansi privat, laporan keuangan digunakan oleh pemilik perusahaan, investor, kreditor, dan pihak manajemen.

Dari sisi standar akuntansi, akuntansi publik di Indonesia mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan akuntansi privat mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Perbedaan lain juga terdapat pada basis akuntansi yang digunakan, di mana sektor publik umumnya menggunakan basis kas menuju akrual, sedangkan sektor privat menggunakan basis akrual penuh.

Perbedaan Akuntansi Publik dan Akuntansi Privat :

Aspek	Akuntansi Publik (Sektor Publik)	Akuntansi Privat (Sektor Swasta)
Tujuan Utama	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik	Pencapaian laba (profit oriented) dan pengambilan keputusan bisnis
Sumber Dana	Pajak, retribusi, hibah, APBN/APBD	Penjualan barang/jasa, modal pemilik, investasi, pinjaman
Pengguna Laporan	Masyarakat, pemerintah, lembaga legislatif, lembaga pengawas	Pemilik, manajemen, investor, kreditor
Standar Akuntansi	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Aspek	Akuntansi Publik (Sektor Publik)	Akuntansi Privat (Sektor Swasta)
Basis Akuntansi	Umumnya basis kas menuju akrual	Basis akrual penuh
Orientasi	Kepentingan publik, pelayanan masyarakat	Kepentingan bisnis, keuntungan pemilik
Bentuk Laporan	Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dll.	Laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan ekuitas
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban kepada publik dan negara	Pertanggungjawaban kepada pemilik dan pemegang saham

Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama menggunakan prinsip akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, perbedaan orientasi, pengguna, sumber dana, dan standar akuntansi membuat akuntansi publik dan akuntansi privat memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Pemahaman perbedaan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkan prinsip akuntansi pada masing-masing sektor.

C. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan publik yang efektif serta efisien. Berbeda dengan akuntansi sektor privat yang berorientasi pada laba, akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pertanggungjawaban penggunaan dana publik yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun penerimaan negara/daerah lainnya. Melalui pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang sistematis, akuntansi sektor publik berperan sebagai sarana informasi yang memungkinkan masyarakat, lembaga legislatif, lembaga

pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya menilai sejauh mana pemerintah atau organisasi publik telah mengelola sumber daya sesuai prinsip good governance.

Secara lebih spesifik, tujuan akuntansi sektor publik dapat dirinci menjadi beberapa aspek penting. Pertama, menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan publik. Kedua, mendukung perencanaan dan pengendalian anggaran, sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa realisasi belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBN maupun APBD. Ketiga, mewujudkan transparansi publik dengan membuka akses informasi keuangan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan. Keempat, menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah, karena laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan dalam penggunaan anggaran.

Dengan demikian, tujuan akuntansi sektor publik tidak hanya sebatas pencatatan transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan integritas pemerintah, serta menjamin bahwa setiap rupiah dana publik digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

D. Karakteristik Organisasi Publik

Organisasi publik merupakan entitas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari publik, seperti pajak, retribusi, dan dana pemerintah. Berbeda dengan organisasi privat yang berorientasi pada keuntungan, organisasi publik memiliki orientasi utama pada pelayanan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan umum. Oleh karena itu, organisasi publik memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari sektor swasta.

Pertama, organisasi publik berorientasi pada public service (pelayanan publik), bukan pada pencapaian laba. Keberadaannya didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat umum, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun keamanan. Kedua, sumber

pendanaannya bersifat kolektif dan wajib, terutama berasal dari pajak, retribusi, serta bantuan hibah dari pihak lain. Ketiga, organisasi publik memiliki pertanggungjawaban yang luas, bukan hanya kepada manajemen internal, tetapi juga kepada masyarakat, lembaga legislatif, lembaga pengawas, serta otoritas negara.

Selain itu, organisasi publik juga ditandai dengan adanya batasan hukum dan regulasi yang ketat, karena pengelolaan keuangannya diatur oleh undang-undang serta standar akuntansi pemerintahan. Struktur birokrasi yang cenderung hierarkis juga menjadi ciri khas, karena setiap keputusan dan kebijakan harus mengikuti prosedur serta aturan yang berlaku. Karakteristik lainnya adalah adanya anggaran sebagai instrumen utama, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pedoman utama dalam kegiatan operasional dan penggunaan dana publik.

Dengan demikian, organisasi publik memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari organisasi privat. Fokus utamanya bukan pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi pada akuntabilitas, transparansi, pelayanan publik, dan pencapaian tujuan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

E. Peran Akuntansi dalam Tata Kelola Publik

Akuntansi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tata kelola publik yang baik (*good public governance*). Melalui akuntansi, setiap transaksi keuangan yang terjadi di sektor publik dapat dicatat, diklasifikasikan, dan dilaporkan secara sistematis, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah, lembaga legislatif, lembaga pengawas, maupun masyarakat. Peran utama akuntansi dalam tata kelola publik adalah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah telah menggunakan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam APBN maupun APBD.

Selain itu, akuntansi juga berperan dalam pengendalian anggaran, di mana pemerintah dapat membandingkan antara rencana anggaran dengan realisasi yang terjadi, sehingga dapat segera dilakukan koreksi apabila terdapat penyimpangan. Peran berikutnya adalah sebagai instrumen evaluasi kinerja, karena laporan keuangan tidak hanya menunjukkan jumlah pengeluaran dan penerimaan, tetapi juga mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Lebih jauh, akuntansi juga mendukung kepercayaan publik terhadap pemerintah, sebab keterbukaan informasi keuangan akan meningkatkan kredibilitas dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Dengan demikian, akuntansi bukan sekadar alat pencatatan transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai pondasi utama tata kelola publik yang baik. Tanpa akuntansi yang transparan dan akuntabel, tata kelola publik akan rentan terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran, serta rendahnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan akuntansi sektor publik menjadi salah satu faktor penentu dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.